

SKRIPSI

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA
DAN PENGUASAAN LAHAN PETANI PADI SAWAH DI
KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**



Oleh:

Nama : Danny Dayusman
BP/NIM : 2002/39790

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

BAB 1

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang semakin adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijaksanaan pembangunan bertumpu pada trilogy pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat melalui upaya pemerataan yang nyata dalam perbaikan pendapatan masyarakat.

Pada tahap awal dari perkembangan mengenai pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan kriteria utama yang dominan bagi pengukuran keberhasilan pembangunan, sebab selain pertumbuhan dinilai sebagai sasaran yang paling tepat juga tersimpan anggapan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi itu pada akhirnya buah pembangunan akan dapat dinikmati oleh miskin melalui koreksi pemerintah yang mendistribusikan kembali hasil pembangunan.

Pemikiran mengenai pembangunan ekonomi yang dilandasi atas pertumbuhan sebagai kriteria utama mengisyaratkan bahwa ketimpangan dan ketidakmerataan semacam persyaratan/kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya perubahan melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kerja.

Tujuan pokok dari pembangunan secara umum adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang tinggi dan meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Sejak pelita I (1969) hingga sebelum terjadinya krisis tahun 1997, secara makro Indonesia sudah mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, pada tahun 1980 tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 6,8% per tahun telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1976 adalah sebesar 54,2 juta orang. Jumlah ini terus menurun, sehingga pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin di Indonesia tinggal sebanyak 25,9 juta orang atau 13,67% dari total penduduk Indonesia. Namun karena terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 79,4 juta orang dan sebanyak 58,8 % berada di perkotaan.

Pada dasarnya untuk mencapai pembangunan secara umum pembangunan ekonomi secara khusus maka di Indonesia pembangunan ekonomi telah dibagi atas 9 sektor usaha. Sektor sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan gas, air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan sewa, jasa dan terakhir sektor jasa-jasa.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita Pmda suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Namun pada saat ini pendapatan perkapita tidak lagi merupakan

satu-satunya ukuran pembangunan perkapita secara keseluruhan tapi taraf hidup sebagian masyarakat tidak berubah. Untuk itu pembangunan ekonomi didefenisikan kembali dalam rangka pemberantasan kemiskinan ketidakmerataan & pengangguran dalam hubungan dengan perekonomian yang sedang tumbuh.

Pedesaan (nagari) dicirikan oleh kemiskinan & keterbelakangan. Hal ini berarti bahwa kemiskinan & keterbelakangan banyak terjadi di daerah pedesaan (nagari). Kemiskinan secara jelas terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan dan pemilikan sektor produksi (lahan) antar keluarga dalam masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk
Per Nagari Kecamatan Lima Kaum

| Nagari | Luas (km | Penduduk | Kepadatan per km |
|------------|----------|----------|------------------|
| Cubadak | 3.10 | 2.155 | 695 |
| Parambahan | 6.00 | 2.571 | 429 |
| Labuah | 5.75 | 2.316 | 403 |
| Limo Kaum | 23.00 | 12.439 | 541 |
| Baringin | 13.15 | 14.830 | 1.128 |
| Jumlah | 51.00 | 34.311 | 3.196 |

Sumber : Kantor-Kantor Wali Nagari

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk terbanyak terdapat di Nagari Baringin karena Nagari Baringin merupakan pusat kota Batusangkar, sedangkan yang penduduknya sedikit terdapat di Nagari Cubadak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mencoba melakukan penelitian dengan judul ***"ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN PENGUASAAN LAHAN PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR"***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana distribusi pendapatan di Kec. Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana distribusi penguasaan luas lahan tani di Kec Lima Kaum.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui distribusi pendapatan masyarakat di Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
2. Dapat melihat pengaruh antara distribusi luas lahan dengan distribusi pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian akan :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi UNP & menambah wawasan penulis di bidang penelitian.
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama ekonomi pembangunan.
3. Bahan masukan untuk pemerintah agar dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian Rumah Tangga atau keluarga di Sumatera Barat, yang dikenal juga dengan masyarakat Minangkabau, berbeda dengan pengertian rumah tangga atau keluarga secara umum. Pengertian rumah tangga secara umum adalah suatu kelompok primer unit terkecil dari masyarakat yang terikat cinta kasih dan kewajiban, serta terikat hubungan biologis, sosial dan ekonomi. Keluarga dalam arti ini terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya (Ginarti dalam Latif 1993:19).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1985) (dalam Latif, 1993:18) yang disebut rumah tangga di minangkabau adalah kelompok hidup yang paloing kecil disebut samande, dipimpin oleh seorang saudara laki-laki ibu yang disebut mamak, tinggal dan hidup bersama di sebuah Rumah Gadang atau ruah asal dengan saudara perempuannya, ibunya, saudara ibunya, neneknya serta keturunan-keturunannya, seterusnya disebut kaum, dipimpin oleh seorang mamak kepada waris. Suami dari anak perempuan yang disebut urang sumando tidak berwenang dan bertanggung jawab mengelola dan membiyai anak-anaknya.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan tentang rumah tangga secara jelas, yaitu rumah tangga yang tersiri dari, seorang suami, seorang istri, anak-anaknya dan ditambah lagi dengan orang-orang yang tinggal di dalam rumah

tersebut, termasuk orang tua, mertua, saudara, atau pembantu yang makan satu dapur.

Lebih lanjut, pengertian pendapatan menurut Hull yang dikutip Nawi (1986:9) adalah:

” Pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga, yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga (termasuk semua barang dan hewan peliharaan), dipakai untuk membagi ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah”

Dalam ensiklopedi Indonesia yang disusun oleh shadilly (1989:11) menyatakan bahwa pendapatan seseorang diartikan sebagai jumlah uang dan barang yang diterima sebagai hasil kerja yang dilakukan.

Jhingan (2003:31) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang dalam periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun yang digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diterima tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

Jika dilihat dari segi pendapatan nasional, maka ada tiga metode dalam menghitung pendapatan yaitu:

a. Metode Pengeluaran

Menurut Sukirno (200:31) pendapatan nasional dihitung dengan menghitung dan menaksir aliran belanja yang dilakukan rumah tangga, penanam

modal, pemerintah dan luar negeri. Aliran belanja ini merupakan nilai pengeluaran yang dilakukan terhadap barang-barang akhir dan jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan.

Barang akhir dan jasa yang dibeli rumah tangga meliputi barang yang digunakan tersebut meliputi bahan makanan dan minuman, berbagai jenis pakaian, barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga

Deliarnov dalam Lestari (2005:24) menggolangkan pengeliran sebagai berikut:

- Pengeluaran konsumsi, yaitu total semua pengeluaran rata-rata untuk membeli barang dan jasa, keperluan rumah tangga
- Pengeluaran perudahaan atau investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal
- Pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti perbaikan jalan
- Ekspor bersih yaitu selisih ekspor dan impor

Uraian diatas menyatakn bahwa dalam metode pengeluaran, pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi, non konsumsi dan tabungan, sementara itu Rosyadi (2003:24) menyatakan bahwa pada pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan semua sektor pertanian yaitu sektor rumah tangga, perudahaan, pemerintah, perdagangan luar negeri.

b. Metode Pendapatan

Menurut Sukirno (2000:32) dalam metode pendapatan yang dihitung dan ditaksir adalah nilai pendapatan dari faktor-faktor produksi, yang berupa gaji dan upah, sewa dan bunga serta keuntungan perusahaan. Pendapatan dari sektor-sektor yang penting adalah gaji dan upah. Rosyadi menyatakan bahwa dalam metode pendapatan terdapat komponen-komponen upah dan gaji, sewa, bunga dan laba.

Deliarnov dalam Lestari (2005:25) menggolongkan pendapatan atas dua yaitu : ” *pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima seluruh anggota masyarakat baik dari hasil kerja, beasiswa, pembayaran pensiunan dan tidak semua pendapatan pribadi dapat langsung digunakan untuk tujuan konsumsi dan tabungan, sebab sebagiannya harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi yang siap digunakan untuk tujuan konsumsi*”

c. Metode Produksi dan Nilai Tambah

Menurut Sukirno (2000:33) metode ini dilakukan dengan menghitung dan menaksir nilai tambah, yaitu pertambahan nilai uang dan suatu barang yang diwujudkan oleh perusahaan dalam perekonomian. Arsyad dalam Lestari (2005:24) mengemukakan bahwa nilai produksi dari barang-barang dan jasa-jasa tersebut merupakan hasil dari sektor produktif pada periode tertentu.

Sedangkan menurut Rosyadi (2003:25) menyatakan bahwa pendekatan produksi dapat dihitung dengan dua cara yaitu:

- 1) Menghitung nilai akhir, yaitu dengan cara menghitung nilai barang yang siap dikonsumsi.

2) Menghitung nilai tambah, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai satu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut.

Berdasarkan cara penghitungan pendapatan nasional diatas maka ada tiga metode dalam menghitung pendapatan yaitu metode pengeluaran, metode pendapatan, dan metode produksi dan nilai tambah.

2. Konsep Distribusi Pendapatan

Konsep distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan, karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidak meratanya hasil pembangunan yang dilakukan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pendapatan perkapita. Namun sering pula ditemui bahwa peningkatan pendapatan masyarakat sering pula diikuti oleh peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Menurut Brenner dalam Todaro (dalam Marlina, 2000 :15) definisi dari teori distribusi pendapatan dinyatakan bahwa teori-teori distribusi pendapatan adalah teori-teori yang membahas mekanisme atau cara kerja distribusi pendapatan diantara kelompok-kelompok dan individu-individu dalam suatu perekonomian. Umumnya teori-teori distribusi pendapatan dibedakan atas teori distribusi pendapatan fungsional dan teori distribusi pendapatan personal.

Berdasarkan kepada definisi dari teori distribusi pendapatan diatas, maka secara garis besar distribusi pendapatan masyarakat terdiri dari:

- a. Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan faktor yaitu distribusi yang menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional juga menyelidiki persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

b. Distribusi pendapatan perorangan atau ukuran

Distribusi pendapatan perorangan (personal distribution) menunjukkan hubungan antara individu-individu atau rumah tangga dengan total pendapatan yang mereka terima. Dalam konsep ini tidak diperhitungkan dari mana pendapatan diperoleh dan berapa besarnya masing-masing individu atau rumah tangga menerimanya serta asalnya apakah dari bekerja atau dari penerimaan lain seperti bunga, hadiah, laba atau warisan dan lain-lain. Selanjutnya tempat (kota atau desa) sektor penerimaan tersebut (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) diabaikan.

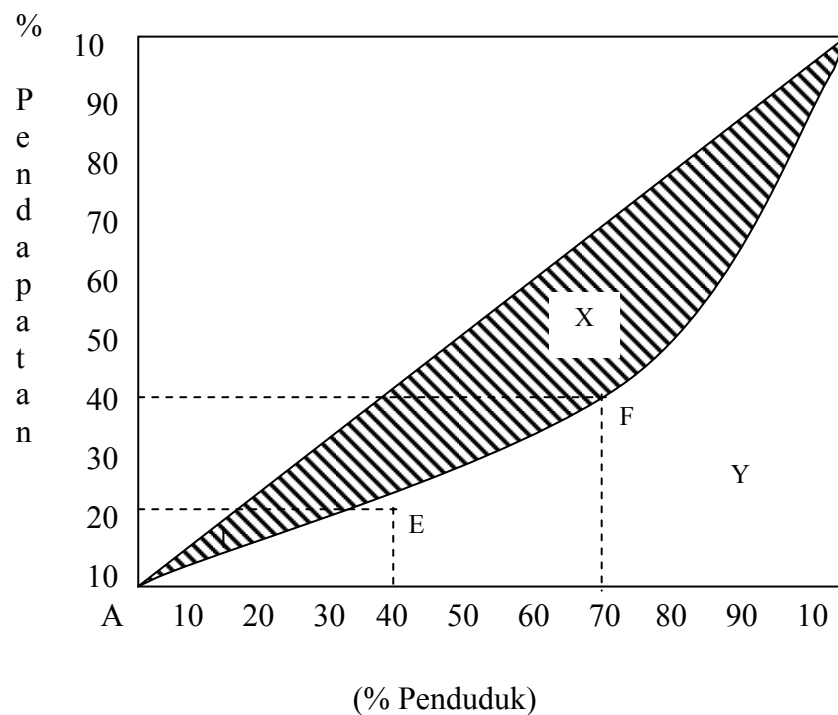
3. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tolak ukur kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan menurut Bernner (dalam Marlina, 2000:9) antara lain:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan nasional di kalangan lapisan masyarakat secara kumulatif. Kurva ini terletak

dalam bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz semakin dekat dengan diagonal (garis 45°) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (makin lengkung) mencerminkan keadaan distribusi pendapatan yang semakin timpang.



Gambar 1 Kurva Lorenz

Pada titik E gambar 1, memperlihatkan bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah hanya memperoleh 20% dari total pendapatan nasional, dan pada titik F memperlihatkan 70% penduduk berpendapatan rendah hanya menikmati 40% dari total pendapatan nasional. Kondisi ini memperlihatkan

ketimpangan pendapatan yang terjadi lebih tinggi di titik F daripada di titik E karena titik F semakin menjauhi garis diagonal.

b. Gini Coefficient atau Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Gini Rasio yaitu merupakan ukuran *inequality agregatif* yang dikembangkan dari Kurva Lorenz. Koefisien Gini ini berasal dari nama seorang ahli statistik Italia yaitu C. Gini yang merupakan orang pertama kali memformulasikannya pada tahun 1912.

Gini rasio ini diperoleh dengan membagi daerah yang dibentuk oleh Kurva Lorenz bersama garis diagonal dengan area segitiga yang terdapat dalam bujur sangkar dimana Kurva Lorenz itu berada. Seperti pada gambar 2.1, Gini Rasio merupakan rasio luas bidang X (luas bidang yang diarsir) terhadap luas segitiga ABC atau secara matematis :

$$\text{Gini Rasio} = \frac{\text{luas } X}{\text{segitiga } ABCD} = \frac{X}{X + Y} \dots\dots\dots (1)$$

(Todaro dalam Marlina, 2000 :12)

Besarnya nilai dari koefisien gini adalah berkisar antara angka nol sampai satu. Semakin kecil nilai dari Gini Rasio (mendekati nol) menandakan semakin baik atau semakin merata distribusi pendapatan dan sebaliknya semakin besar nilai Gini Rasio (mendekati satu) maka semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Selanjutnya untuk melihat tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan Gini Rasio menurut Torado (2000:188) ada tiga klasifikasi nilai Gini Rasio, yaitu :

- 1) $0,20 < GR < 0,30$ adalah ketimpangan ringan
- 2) $0,30 < GR < 0,50$ adalah ketimpangan sedang
- 3) $0,50 < GR < 1,00$ adalah ketimpangan tinggi

Secara matematis Gini Rasio dapat diukur dengan menggunakan persamaan (Soedjono, 1978 : 122)

$$GR = 1 - \sum f_i \cdot i - f_i \cdot (Y_i + Y_{i-1}) \dots\dots\dots(2)$$

$$F_i = f_i \cdot I - f_i \cdot I - 1 \dots\dots\dots(3)$$

$$GC = 1 -$$

Ket :

Y_i = proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke i

f_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = jumlah kelas

c. Kriteria Bank Dunia

Menurut Dumairy (dalam Marlina, 2000 : 14) ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga dapat dilihat dari kriteria Bank Dunia yang berdasarkan atau porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Kemudian dikatakan sedang atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati 12% - 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional maka ketimpangan distribusi pendapatan terjadi ketimpangan lunak.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Soekirno (1981 :13), pembangunan adalah usaha masyarakat untuk pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Sedangkan Torado (dalam Marlina 2000 :15) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses untuk memperbaiki mutu kehidupan manusia dimana pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi banyak melibatkan dalam pengorganisasian dan seluruh sistem ekonomi dan sosial.

Selanjutnya menurut Seers dalam Torado (dalam Marlina 2000 : 25) bahwa pembangunan, merupakan suatu proses kejadian menurunkan angka dan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan. Sedangkan Adam Smith (dalam Marlina, 2000 : 26) menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang bisa maju dan bahagia ditengah sebagian besar penduduknya berada dalam keadaan miskin yang tidak adil secara sosial serta tidak berusaha untuk memperbaiki masa depannya.

Dari berbagai pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang berkelanjutan (*sustainable*) yang bersifat dinamis menuju kearah perbaikan sebenarnya, atau dengan kata lain sebagai upaya peningkatan keseluruhan sistem sosial dan ekonomi menuju kesuatu kehidupan yang berperikeadilan dan berperikemanusiaan sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 kemudian sesuai dengan konsep trilogi pembangunan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Kalau kita lihat disini bahwa konsep pemerataan pendapatan penduduk adalah salah satu refleksi dari pembangunan.

a. Pendapat Adelman dan Moris (dalam Marlina, 2000 : 16) bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh :

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan pendapatan perkapita.
- 2) Inflasi, pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- 3) Ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

- 4) Investasi yang banyak pada proyek padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar bila dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengaruhnya bertambah.
- 5) Rendahnya mobilitas sosial.
- 6) Kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis.
- 7) Memburuknya nilai tukar (*Term of Trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakpastian permintaan barang-barang ekspor negara berkembang.
- 8) Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan dan industri rumah tangga lainnya.

Hasil penelitian Kuznet (dalam Marlina, 2000 : 17) menemukan bahwa faktor utama yang menentukan ketimpangan masyarakat adalah faktor pendapatan. Dengan menggunakan data lintas negara ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dan diukur dari tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat ketimpangan pendapatan pada tahap awal pembangunan. Namun jika pertumbuhan ekonomi sudah mantap maka terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan perkapita diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Selain tingkat pendapatan perkapita, Kuznet menemukan juga bahwa penurunan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional suatu negara akan cenderung meningkatkan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena dalam proses industrialisasi terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Selain itu juga terdapat faktor-faktor penting lain yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Khusus pada masyarakat pertanian distribusi kepemilikan asset juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, terutama asset tanah.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, Adelman dan Morris (dalam Marlina, 2000 : 31) ketimpangan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1) Sistem perekonomian

Semakin besar peranan sektor swasta dalam perekonomian maka semakin timpang distribusi pendapatan.

2) Proporsisi faktor produksi

Proporsi faktor produksi sangat mempengaruhi distribusi pendapatan. Salah satu faktor produksi yang penting adalah tenaga kerja. Laju pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat upah. Pada giliran berikutnya, hal ini akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

3) Teknologi

Dewasa ini teknologi yang ditransfer ke negara-negara berkembang kebanyakan bersifat kapital intensif. Sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Dengan demikian penggunaan teknologi yang bersifat padat modal akan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan.

4) Kebijakan Fiskal

Salah satu aspek kebijakan fiskal adalah penerimaan negara dari sisi pajak. Penerimaan pajak ini dapat digunakan untuk memberikan berbagai pelayanan publik terhadap masyarakat, seperti : pelayanan kesehatan, pembebasan biaya sekolah, pembebasan biaya listrik dan air bersih. Hal ini bisa membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga mengurangi dampak ketimpangan pendapatan.

5) Strategi Pembangunan

Strategi substitusi impor akan cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dibandingkan dengan strategi berorientasi ekspor. Karena dalam strategi substitusi impor harga barang-barang dalam negeri tinggi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Akibatnya dampak ketimpangan distribusi pendapatan akan bertambah parah.

b. Distribusi Penguasaan Lahan

Lahan atau dalam hal ini kita sebut dengan tanah adalah salah satu dari tiga kombinasi faktor-faktor produksi dalam pertanian selain modal dan tenaga

kerja. Tanah sebagai salah satu faktor produksi adalah merupakan pabriknya hasil-hasil pertanian yaitu tempat dihasilkannya produksi pertanian.

Menurut Mubyarto (1986 : 76) dalam pertanian, terutama di negara kita, faktor produksi tanah memiliki peranan yang paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh petani dari tanah dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Seperti halnya modal dan tenaga kerja dapat pula dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tanah itu dalam masyarakat dan daerah tertentu. Produksi suatu komoditi pertanian sangat ditentukan oleh tanahnya. Semakin subur tanah maka semakin baik produksi dan sebaliknya semakin kurang kesuburan tanah maka semakin rendah produksi pertanian. Usaha pertanian di Indonesia dirincikan oleh dua hal, yaitu : usaha pertanian skala besar yang lazimnya dikelola oleh perkebunan negara atau swasta dan skala kecil yang lazimnya disebut usaha pertanian rakyat yang berlahan sempit (Soekarwati, 1996 : 28).

Pembahasan mengenai masalah pertanahan tampak meningkat, khusus mengenai hubungannya dengan penyebaran pendapatan, dan hubungannya dengan diferensiasi masyarakat pedesaan. Menurut Geertz (dalam laporan Wiradi, 1983 : 43) walaupun penduduk di Jawa semakin bertambah dan sumber daya semakin langka, namun masyarakat di Jawa tidak tertutup menjadi sekelompok tuan tanah dan sekelompok hamba tani karena kebiasaan membagi rezeki.

Namun pendapat Geertz mendapat kritik salah satunya dari Kano yang melakukan penelitian di dua tempat di Jawa Timur dan DI Yogyakarta tahun 1976

(dalam Wiradi, 1983 : 44) dinyatakan kesimpulan Kano adalah berbeda dalam gambaran Geertz, yaitu adanya perbedaan yang jelas sekali antara *the have* dan *the have not* yaitu antara mereka yang memiliki tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah.

Dari gambaran yang berbeda-beda oleh peneliti di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang distribusi penguasaan tanah di desa-desa di Indonesia itu memiliki perbedaan.

Berbagai masalah yang menyangkut ketimpangan penguasaan tanah mungkin secara ekonomis dapat diatasi, namun implikasi sosial jangka panjang perlu juga disadari. Mengingat yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah petani padi sawah maka yang menjadi pusat perhatian disini adalah distribusi penguasaan sawah.

Akan tetapi pemilikan formal bukanlah selalu mencerminkan penguasaan nyata atas tanah. Ada beberapa cara yang dilakukan petani untuk menguasai dan menggarap tanah / sawah. Menurut Wiradi (1983 : 63) secara umum ada beberapa kelembagaan penguasaan tanah, yaitu :

1) Pemilik Penggarap

Petani pemilik penggarap merupakan petani yang mengusahakan lahan milik dia sendiri. Menurut Currie, 1981 (dalam Sentosa, 2001(dalam Yulisari, 2004 : 17)) petani ini diklasifikasikan berdasarkan atas sumber tenaga yang digunakan dalam usaha tani, karena itu Currie membedakan petani pemilik

penggarap atas dua macam yaitu *Capitalist Farmers* dan *Peasant Farmers*.

Capitalist Farmers merupakan petani yang sama sekali mengandalkan tenaga kerja upahan dalam melaksanakan usaha taninya. Hal ini menunjukkan dalam penguasaan tanah melalui sistem pemilik penggarap para petani dapat menggunakan tenaga kerja upahan saja, tenaga kerja dalam keluarga, atau kombinasi keduanya.

2) Penggarap Melalui Sistem Sewa Tetap

Menurut Gunawan dan Pasandaran, 1989 (dalam Santosa, 2001) (dalam Yulisari, 2004 : 17) sistem sewa merupakan cara pengalihan hak garap yang lebih lugas dan mengarah pada transaksi pada pembayaran dengan uang tunai. Dalam sistem sewa pemilik lahan menyerahkan hak penguasaan lahannya kepada penggarap dalam jangka waktu tertentu dan penggarap membayar sejumlah sewa lahan (Ihalauw, dkk 1985, dan Soeparmako, 1994) (dalam Santosa, 2001) Dalam hal ini penggarap akan membayar sejumlah sewa yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pemilik lahan dan penyewa menanggung semua resiko kegagalan panen. (Currie, 1981, dalam Santosa, 2001) (dalam Yulisari, 2004 : 17). Menurut Tjiptohariyanto, 1978 (dalam Yulisari, 2004 : 17) bahwa kontrak sewa paling menguntungkan petani bila ditinjau dari segi pendapatan, hanya perlu diingat bahwa sistem kontrak sewa akan memukul petani penggarap bilamana berhadapan dengan kegagalan panen.

3) Penggarap Melalui Sistem Bagi Hasil (sakap)

Menurut Cheung, 1968 dan Ellis, 1993 (dalam Sentosa, 2001 (dalam Yulisari, 2004 : 18)) mengemukakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sebuah tipe penggarapan lahan dimana pembayaran atas penggunaan lahan yaitu berupa sewa yang merupakan persentase dari total output fisik diperoleh pada masa panen. Proporsinya adalah tetap, sedangkan jumlah absolut dari sewa lahan adalah berbeda-beda sesuai dengan jumlah hasil panen, sehingga penggarapan lahan melalui sistem ini berbeda dari sistem pemilik penggarap, sistem sewa, dan penguasaan lahan dengan menggunakan tenaga kerja berupa tetap.

Selanjutnya menurut Ellis, 1993 (dalam Yulisari, 2004 : 18) sistem sakap ini cenderung dianggap sebagai sebuah teka-teki yang secara teoritis sangat menarik perhatian ahli ekonomi neoklasik dan juga dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi, oleh para ahli ekonomi Marx (Marxician) sistem sakap ini dianggap sebagai sebuah teka-teki karena ketidakmampuan dari alat analisis ekonomi biasa untuk menerangkan aspek tertentu dari keberadaannya sebagai sebuah kelembagaan yaitu berupa :

- (1) Adanya alasan-alasan tertentu yang menduga bahwa sistem bagi hasil ini kurang efisien dan kurang terbuka terhadap inovasi jika dibandingkan dengan sistem penggarapan lainnya.
- (2) Sistem sakap ini sering kali berada pada lokasi yang sama dengan sistem penggarapan lainnya yaitu sistem sewa, dan penguasaan lahan dengan tenaga kerja berupa tetap.
- (3) Pembagian hasil antara pemilik lahan dengan penyakap (misalnya 50:50) tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kriteria *optimizing*.

Sedangkan sistem sakap ini dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi karena terdapatnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pemilik lahan dan

pengawasan yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap penggarap. Antara sisi teka-teki dan eksploitasi dalam sistem sakap ini adalah saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini digambarkan secara jelas oleh Bardhan, 1980 dan Ellis, 1993 (dalam Yulisari, 2004 : 18) *interlinked factor markets* atau saling berkaitan antar pasar faktor.

Cheung, 1879 (dalam Yulisari, 2004 : 119) menyatakan bahwa sistem persewaan tanah dengan cara bagi hasil (*share cropping*) adalah tidak efisien. Dengan berdasarkan teori pada asumsi bentuk dari kontrak bagi hasil di sektor pertanian tidaklah ditentukan secara “*exogenous*” tetapi variabel yang “*endogenous*”, maka menurut Cheung kontrak tersebut dievaluasi sedemikian rupa sehingga didapat efisiensi.

Cheung melihat sistem bagi hasil ini efisien, selama menurut asumsinya yang lain biaya untuk “tawar-menawar” (Bargaining Cost) dalam kontrak tersebut adalah nol. Artinya, petani penggarap baik sebagai penyewa (*fixed rent*) atau sebagai petani bagi hasil (*share tenancy*). Berdasarkan kenyataan ini, Cheung melihat keuntungan sistem bagi hasil yang disebabkan :

- a) Sistem bagi hasil akan menimbulkan kompetisi di kalangan petani penggarap untuk meningkatkan produksi.
- b) Menimbulkan kompetisi antara pemilik tanah untuk memperoleh penggarap yang rajin.
- c) Alokasi daripada sumber-sumber yang digunakan sehubungan dengan sistem hak milik pribadi, akan sama saja baik bilamana pemilik mengerjakan sendiri tanahnya (sawahnya) menyewakan pada orang lain ataupun kontrak bagi hasil.

Jadi kesimpulan Cheung, sistem bagi hasil ini akan efisien bila didasarkan pada asas “*fifty-fifty*” antara pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah tidak bisa berbuat apa-apa bila tidak ada petani penggarap begitu juga sebaliknya petani penggarap tidak akan berdaya bila tidak ada pemilik yang mau mempercayakan padanya untuk menggarap sawahnya.

Menurut Badan Pusat Statistik ada beberapa penggolongan penguasaan tanah, yaitu :

- 1) Tanah Milik
- 2) Tanah yang tidak dimiliki, terdiri dari:
 - a. Sewa
 - b. Bagi Hasil
 - c. Gadai
 - d. Tanah dari Negara/ desa tanpa sewa
 - e. Tanah dari pihak lain tanpa sewa
 - f. Tanah secara balas jasa
 - g. Tanah Serobotan

Rata-rata penguasaan tanah di Indonesia berdasarkan pada sistem bagi hasil adalah yang tersebar dipakai. Berdasarkan Statistik Tahunan BPS tahun 1975 bahwa di Sumatera Barat persentase berdasarkan sistem sewa berjumlah 10,97%, sistem bagi hasil sebesar 66,76%, sistem gadai 19,57%, dan lain-lain sebesar 2,31%. Berarti di Sumatera Barat sistem penguasaan tanah dengan bagi hasil jauh lebih besar dari sistem lainnya.

Penguasaan tanah di pedesaan merupakan masalah kompleks dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah dan politik. Seperti di Jawa adanya istilah tuan tanah yang berasal dari kebudayaan feodal telah menyebabkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah. Tuan tanah menguasai tanah yang begitu luas sedangkan rakyat yang tidak memiliki tanah hanya sebagai buruh tani.

Kelembagaan Penguasaan Lahan Pertanian di Propinsi Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Masyarakat Minangkabau merupakan suatu kelompok etnik matrilineal. Dalam sistem matrilineal keturunan dihitung dari garis ibu, sehingga garis keturunan akan menentukan sistem pewarisan atau pusaka.

1) Pemilikan Lahan Pertanian

Lahan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk di Propinsi Sumatera Barat yaitu hutan tinggi (tanah ulayat) dan hutan rendah. Hutan tinggi merupakan lahan yang belum diolah atau dijadikan lahan pertanian. Tanah ulayat merupakan cadangan bagi penduduk yang terus bertambah, sedangkan hutan rendah merupakan semua lahan yang telah diolah menjadi lahan pertanian atau perumahan. Kedua jenis lahan ini diperuntukkan bagi kepentingan bersama anggota masyarakat.

2) Penguasaan Lahan Pertanian

Kalau dari segi penguasaan lahan pertanian secara umum sama dengan daerah lain. Penguasaan tanah dapat berupa pemilik penggarap, sistem sewa, sistem bagi hasil, sistem gadai, dan lain-lain.

Hubungan Tanah Dengan Kemakmuran

Rivai 1958 dalam Mubyarto (1986 : 83) disimpulkan bahwa :

Golongan petani penyakap memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan pemilik karena golongan penyakap hanya menggantungkan diri pada tanah sakapannya sehingga ia lebih giat dalam bekerja. Akhirnya pemilik lahan menjual lahannya sedikit demi sedikit, jadi penggarap, lalu jadi penyakap, buruh tani, suatu proses pemelaratn terus menerus.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa petani pemilik lahan yang pendapatannya hanya berasal dari bagi hasil dari orang lain yang menyakap tanahnya maka penghidupannya akan terus menurun.

Distribusi modal dan lahan antar rumah tangga merupakan determinan penting fungsi besar kecil sewa lahan dan pendapatan modal. Khususnya di negara ketiga yang paling miskin distribusi lahan adalah determinan utama distribusi pendapatan dan luasnya kemiskinan (Quan and Kou, 1985, dalam Gammell, 1992 :225)

Negara-negara yang telah berhasil memadukan pertumbuhan dengan distribusi pendapatan yang relatif wajar, seperti Taiwan, Korea Selatan, Kosta Rika, ditandai dengan distribusi lahan yang merata (Francks, 1979 : Gonzales dan Vega dan Cespedes, 1983, dalam Gammell, 1992 : 225). Hal ini memungkinkan sejumlah besar penduduk pedesaan memperoleh bagian dari pendapatan usaha pertanian yang meningkat. Disamping itu negara-negara yang distribusi lahannya tidak merata cenderung distribusi pendapatannya pun tidak merata (Osmani dan Rahman dalam Gammell, 1992 : 225).

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada dasarnya terjadi karena kepemilikan sumber-sumber atau faktor produksi seperti tanah, modal, pengetahuan, keterampilan, akses terhadap kredit dan fasilitas.

Luas penguasaan tanah mempengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa petani bertanah sempit dan tidak bertanah sama sekali akan kurang mampu mencari pendapatan diluar sektor pertanian dibandingkan dengan petani yang bertanah luas. Bila hal itu benar, maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga berhubungan erat dengan distribusi penguasaan lahan.

Menurut Suryana (1981 : 68) ada tiga hubungan antara luas kepemilikan sawah dengan pendapatan baik dari sektor pertanian dan luar pertanian :

- a. Hubungan positif, artinya semakin besar pendapatan dari sektor pertanian karena makin luasnya tanah milik makin besar pula pendapatan dari luar sektor pertanian.
- b. Tidak ada hubungan sama sekali
- c. Hubungan negatif, artinya makin kecil pendapatan dari sektor pertanian karena makin sempitnya tanah milik, makin besar pendapatan dari luar sektor pertanian.

Menurut Mintoro (1984 : 270) anggapan bahwa besarnya surplus pendapatan dari sektor pertanian mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan rumah tangga tidak selalu benar. Karena ada desa-desa yang kesempatan kerja diluar sektor pertanian terbuka lebar, distribusi pemilikan tanah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dari luar sektor pertanian.

Kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan pada dasarnya terjadi karena ketimpangan kepemilikan sumber-sumber seperti tanah, modal, pengetahuan, keterampilan, akses terhadap kredit, dan fasilitas. Ketimpangan pembagian pendapatan dapat semakin besar seiring dengan pembangunan dan polarisasi pertumbuhan antara sektor modern yang umumnya di kota dengan sektor tradisional yang berada di desa, serta antara sektor pertanian dan sektor non pertanian (Mubyarto, 1983 : 179).

7. Temuan Penelitian Sejenis

Dalam Thesis Syaiful (dalam Nofrizal, 2000 :9) dikatakan besarnya pendapatan masyarakat ditentukan oleh banyaknya mata pencaharian dan luas lahan pertanian. Pada umumnya pekerjaan diluar sektor pertanian seperti pegawai, pedagang, buruh biasa dan usaha jasa lainnya akan memberikan pendapatan yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerjaan sebagai petani.

Dalam penelitian Marlina (2000:13) dinyatakan bahwa alasan dipilihnya Gini Rasio sebagai alat pengujian karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

- 1) Merupakan indikator paling tepat dan umum digunakan
- 2) Merupakan variabel yang dinamis, dalam mengukur perubahan ketimpangan baik antar daerah ataupun antar sektor.
- 3) Memperlihatkan kecenderungan yang sama menurut kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Kalau ditinjau hubungan antara distribusi penguasaan tanah dengan distribusi pendapatan maka sesuai dengan hasil penelitian Hanum (1991 : 31), distribusi penguasaan tanah mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi pendapatan. Semakin timpang penguasaan tanah maka akan diikuti pula oleh ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi di daerah pedesaan, tanah merupakan faktor produksi untuk kegiatan pertanian dan tanah merupakan penentu untuk memajukan kegiatan ekonomi di luar pertanian.

Hasil penelitian Kuznet (dalam Marlina, 2000 : 17), menemukan bahwa faktor utama yang menentukan ketimpangan masyarakat adalah faktor pendapatan. Dengan menggunakan data lintas negara ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dan diukur dari tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat ketimpangan pendapatan pada tahap awal pembangunan. Namun jika pertumbuhan ekonomi sudah mantap maka terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan perkapita diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Selain tingkat pendapatan per kapita, Kuznet menemukan juga bahwa penurunan peran sektor pertanian terhadap pendapatan nasional suatu negara akan cenderung meningkatkan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena dalam proses industrialisasi terjadi pergeseran tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor industri.

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan Ahluwalia (dalam Marlina, 2000 : 18) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara tingkat kualitas

sumber daya manusia dengan pemerataan pendapatan. Tingkat kualitas sumber daya manusia ini dapat diukur dengan tingkat pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelasnya pengaruh distribusi kepemilikan lahan dan tingkat pendidikan terhadap distribusi pendapatan maka akan dibahas lebih dalam dibawah ini.

Kalau ditinjau dari distribusi kepemilikan sawah maka dari penelitian Wiradi (1985 : 51) disimpulkan bahwa distribusi kepemilikan sawah di desa-desa penelitian sangat timpang. Hampir disetiap desa itu, Indeks Gini menunjukkan angka di atas 0,60, terutama di Jawa dimana 6 dari 12 desa yang menjadi tempat penelitian Indeks Gininya diatas 0,80 suatu tingkat ketimpangan yang berat.

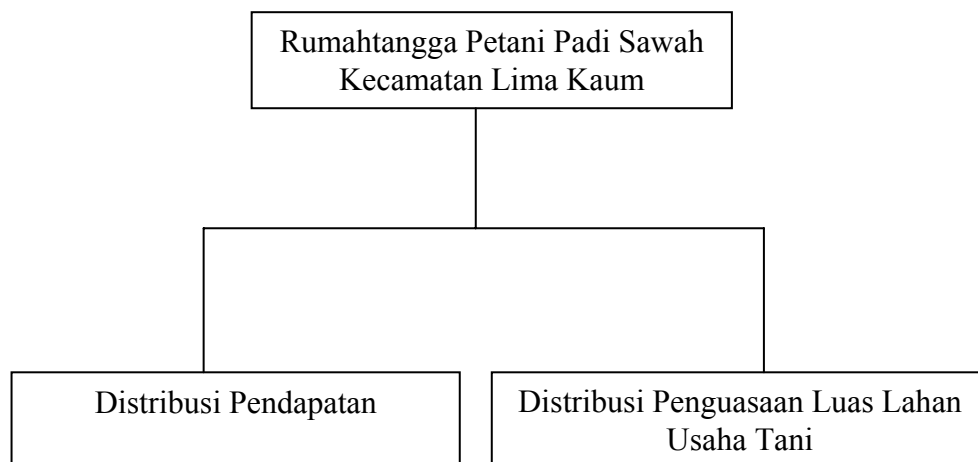
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal (2000: 34-35) yang berjudul “Distribusi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang” ditemukan hasil sebagai berikut :

Dari perhitungan yang dilakukan untuk distribusi pendapatan dari sektor pertanian diperoleh Indeks Gini sebesar 0,435. Hal ini berarti ketimpangan petani dari sektor pertanian tergolong sedang, karena berada pada Interval angka 0,4-0,5. Sedangkan dengan menggunakan ukuran bank dunia diperoleh nilai 15,74% artinya 40% dari total penduduk yang berpendapatan rendah disektor pertanian menerima bagian pendapatan sebesar 15,74% hal ini tergolong dalam kepincangan sedang.

Sedangkan dari segi hubungan luas lahan dengan pendapatan petani yang dalam hal ini Nofrizal menggunakan rumus Korelasi Spearman didapatkan angka 0,99464. berarti hubungan antara pendapatan dengan luas lahan kuat.

B. Kerangka Konseptual

Kesempatan kerja diluar sektor pertanian sangat mempengaruhi tingkat ketimpangan rumah tangga petani pada umumnya begitu juga untuk rumah tangga petani padi sawah. Menurut Mintoro (1984 : 170) pada desa-desa yang kesempatan kerja diluar sektor pertanian sangat terbatas, distribusi penguasaan tanah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dari luar sektor pertanian. Sebaliknya pada desa-desa yang kesempatan kerja di luar sektor pertanian terbuka lebar, distribusi penguasaan tanah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dari luar sektor pertanian. Rumah tangga petani yang mempunyai lahan sempit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka mencari pekerjaan di luar pertanian padi sawah atau di luar sektor pertanian.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

C. Hipotesis kerja Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada Pendahuluan maka penulis merumuskan hipotesis kerja penelitian sebagai berikut :

1. Distribusi pendapatan rumah tangga petani padi sawah di Kecamatan Lima Kaum berada dalam keadaan rendah (ringan)
2. Distribusi penguasaan luas lahan usaha tani rumahtangga petani padi sawah Kecamatan Lima Kaum berada dalam keadaan rendah (ringan)